

**KAJIAN DAMPAK PEMBANGUNAN RUAS TOL MOJOKERTO - KERTOSONO TERHADAP
KELANGSUNGAN MATA PENCAHARIAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO**

Nur Fa'iza Afifah

Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
izaafifah@yahoo.com

Drs. Daryono, M.Si

Dosen Pembimbing Mahasiswa

Abstrak

Pembangunan transportasi merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memajukan suatu wilayah, karena dengan adanya transportasi yang memadai akan mempermudah mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Proyek pembangunan ruas jalan Tol Mojokerto – Kertosono yang melalui Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto pada saat ini masih dalam proses pembangunan dan hal ini mengharuskan pemerintah membebaskan lahan milik masyarakat. Luas lahan sawah yang dibebaskan di Kecamatan Gedeg yaitu 335.550 m². Terdapat sebagian masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pembebasan lahan ini karena harga yang diberikan oleh pemerintah berada di bawah harga pasaran pada umumnya di Kecamatan Gedeg, dari keseluruhan masyarakat yang lahannya dibebaskan, terdapat 5 orang (1,5%) yang melakukan penolakan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui; 1) penggunaan dana ganti rugi pembebasan lahan oleh masyarakat, 2) kelangsungan mata pencaharian sebagai petani yang lahan persawahannya terkena pembebasan lahan tol, 3) perbedaan pendapatan masyarakat yang lahan persawahannya terkena pembebasan lahan tol Mojokerto – Kertosono di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto sebelum dan setelah proses pembebasan. Jenis penelitian ini adalah survei. Lokasi penelitian di Desa Sidoharjo, Terusan, Kemantren, Pagerluyung, dan Gedeg, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Responden penelitian ini yaitu petani yang lahannya dibebaskan di 5 desa tersebut. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan Uji t berpasangan (*paired t-test*). Hasil penelitian menunjukkan; 1) sebagian besar responden (52%) menggunakan uang ganti rugi yang didapat untuk dibagikan kepada anak atau saudara, 2) 45% responden mengalami perubahan mata pencaharian, 3) terjadi perbedaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan setelah pembebasan lahan yaitu penurunan pendapatan sebesar 16,8 %.

Kata Kunci: pembangunan, pembebasan lahan, masyarakat, mata pencaharian, pendapatan.

Abstract

Transportation development is a part of government's efforts to improve a certain area, since the presence of an adequate transportation will ease the social and economic mobility. The construction of Mojokerto-Kertosono highway, which is built through Gedeg district in Mojokerto regency, is still under construction currently and this fact makes the government did land acquisition. The rice-field area acquired in Gedeg district is 335.550 m². There are people who commit the rejection of the land acquisition is because the price given by the government under market value generally in the Gedeg district, of the people who have been released there are 5 people (1,5%) doing a piece for rejection. This study aims at finding out: 1) the use of compensation money for the land acquisition, 2) the community's livelihood continuance as farmers, as their rice-fields were acquired for the highway construction, 3) comparison on community's income in Gedeg district in Mojokerto, before and after the land acquisition. This study uses survey research design. It was conducted in some villages including Sidoharjo, Terusan, Kemantren, Pagerluyung, and Gedeg which are all located in Gedeg district in Mojokerto regency. The respondents are the farmers whose lands are involved in the land acquisition in those five villages. The data were analyzed using descriptive quantitative technique and paired t-test. The result of this study shows that: 1) 52% of the respondents share the compensation money to their children or relatives, 2) 45% of the respondents get their livelihoods switched, 3) there is significant difference on the community income before and after the land acquisition, in which it decreases by 16,8%.

Keywords: construction, land acquisition, community, livelihood, income.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang selalu diusahakan oleh setiap negara untuk menunjang keberlangsungan kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya. Aspek yang menjadi sasaran utama pembangunan suatu negara yaitu aspek ekonomi, sosial, serta budaya. Pembangunan dalam berbagai aspek ini harus selalu dilakukan sebagai upaya suatu negara untuk mengikuti segala perkembangan dunia yang berlangsung secara dinamis.

Aspek transportasi menjadi perhatian yang penting. Transportasi merupakan modal utama bagi berlangsungnya perkembangan suatu negara. Wilayah dengan sistem transportasi yang baik, akan lebih cepat maju daripada wilayah dengan sistem transportasi yang kurang memadai.

Berlangsungnya berbagai upaya pembangunan oleh pemerintah pusat, ditandai dengan adanya rencana pembangunan ruas jalan tol baru di berbagai daerah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tujuan diselenggarakannya jalan tol adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Transportasi berfungsi sebagai pemersatu dalam melayani arus barang dan penduduk serta mendorong pertumbuhan daerah. Penyediaan fasilitas transportasi dibutuhkan strategi yang tepat, kebijakan dan perencanaan yang terkoordinasi dan bersifat antisipatif terhadap perkembangan kegiatan sektor lain serta kemajuan teknologi yang cenderung berkembang cepat (Adisasmita dan Adisasmita, 2011 : 45).

Pembangunan ruas jalan tol ini diprioritaskan pada jalan tol Trans Jawa, yang merupakan jalan tol yang akan menghubungkan berbagai wilayah dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Panjang jalan tol tersebut 661,62 km yang terbagi dalam 10 (sepuluh) ruas yang terdiri dari Cikampek - Palimanan, Kanci - Penjagan, Penjagan - Pemalang, Pemalang - Batang, Batang - Semarang, Semarang - Solo, Solo - Mantingan - Ngawi, Ngawi - Kertosono, Kertosono - Mojokerto, dan Mojokerto - Surabaya (Jurnal Ibukota.com). Ruas tol Mojokerto - Kertosono melalui 1 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, yaitu Kecamatan Gedeg, yang terdiri dari 5 desa.

Pemerintah melakukan kebijakan berupa pengadaan tanah/pembebasan lahan milik penduduk yang dilalui oleh ruas jalan tol dengan melakukan sistem pemberian uang ganti rugi. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Objek pengadaan tanah

adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah/ atau lainnya yang dapat dinilai (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015).

Sistem ganti rugi yang dilaksanakan untuk pembebasan lahan ini diterapkan dengan memberikan harga sebesar Rp 125.000,- per meter persegi untuk lahan berupa persawahan. Berikut merupakan rincian bentuk jenis penggunaan lahan dan luas lahan yang dibebaskan di Kecamatan Gedeg:

Tabel 1. Bentuk Penggunaan Lahan dan Luas Lahan Yang Dibebaskan di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan Yang Dibebaskan (m ²)
1.	Persawahan	335.550
2.	Pekarangan dan Bangunan	24.854
3.	Fasilitas Umum	71.234
Jumlah		431.638

Sumber: Data Sekunder, 2016 (Kantor Desa yang bersangkutan)

Secara keseluruhan, lahan yang dibebaskan di Kecamatan Gedeg sebagian besar merupakan lahan persawahan. Berikut merupakan tabel secara rinci luas lahan persawahan yang dibebaskan di setiap desa yang dilalui pembangunan ruas Tol Mojokerto-Kertosono di Kecamatan Gedeg:

Tabel 2. Daftar Desa Yang Dilalui Dan Luas Lahan Sawah Yang Dibebaskan Untuk Pembangunan Ruas Tol Mojokerto-Kertosono Di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa	Luas Lahan Yang Dibebaskan (m ²)
Gedeg	Sidoharjo	53.562
	Terusan	20.683
	Kemantren	71.158
	Pagerluyung	167.777
	Gedeg	22.370
Jumlah		335.550

Sumber: Data Sekunder, 2016 (Kantor Desa yang bersangkutan)

Desa Pagerluyung merupakan desa yang wilayahnya terkena pembebasan lahan paling banyak di Kecamatan Gedeg, karena pada rencananya letak jalan lingkar (*ring road*) dari ruas tol ini yang melalui Kabupaten Mojokerto akan berada di Desa Pagerluyung.

Pembebasan lahan menjadi jalan keluar yang mampu disepakati oleh semua pihak yang terlibat, namun harga yang diberikan oleh pemerintah berada di bawah harga pasaran pada umumnya di Kecamatan Gedeg, karena lahan persawahan pada umumnya bisa mencapai harga ± Rp 200.000,- per meter persegi. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi penduduk yang bersangkutan, selain mendapatkan ganti rugi yang tidak sesuai juga kehilangan lahan persawahan milik mereka.

Kerugian hilangnya sawah pertanian yang menjadi pendapatan pribadi yang selama ini mereka andalkan kemungkinan memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya mengandalkan penghasilan dari sawah miliknya.

Hal ini dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak mudah untuk menggantikan lahan persawahan yang sebelumnya mereka miliki karena sulitnya mencari lahan persawahan yang dijual pada masa sekarang ini, sekalipun ada, harganya akan lebih mahal daripada harga ganti rugi. Kenyataan ini akan menyulitkan kelangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupan perekonomiannya pada lahan sawah yang mereka miliki.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan ruas tol Mojokerto – Kertosono ini akan berpengaruh pada bagaimana kondisi mata pencapaian dan kelangsungan pendapatan masyarakat Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto setelah dilakukannya proses pembebasan lahan. Oleh karena itu, judul penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. **“Kajian Dampak Pembangunan Ruas Tol Mojokerto - Kertosono Terhadap Kelangsungan Mata Pencapaian dan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 1) bagaimana penggunaan dana ganti rugi pembebasan lahan, 2) kelangsungan mata pencapaian masyarakat petani yang lahan persawahannya terkena pembebasan lahan, 3) perbedaan pendapatan masyarakat yang lahan persawahannya terkena pembebasan lahan tol Mojokerto – Kertosono di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto sebelum dan setelah proses pembebasan lahan dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kelangsungan mata pencapaian, yaitu data yang diperoleh di lapangan dianalisis secara deskriptif dan dengan persentase, sedangkan untuk variabel perbedaan pendapatan, akan digunakan analisis menggunakan Uji t berpasangan (*paired t-test*) untuk mengetahui perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pembebasan lahan dilakukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Kecamatan Gedeg di 5 desa yaitu Desa Sidoharjo, Desa Terusan, Desa Kemantren, Desa Pagerluyung dan Desa Gedeg yang lahan pertaniannya dibebaskan guna kepentingan pembangunan ruas tol Mojokerto – Kertosono, secara keseluruhan jumlahnya sebanyak 334 orang. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Ketentuan yang diterapkan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan masyarakat yang lahan pertaniannya dibebaskan minimal 25 % dari keseluruhan lahan miliknya. Berdasarkan ketentuan ini, didapat sampel sejumlah 76 orang.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan warga yang telah

ditetapkan sebagai sampel. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pihak terkait seperti Kantor Kelurahan yang bersangkutan, kantor Kecamatan Gedeg, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto, serta Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto.

HASIL

Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penggunaan uang ganti rugi

Besaran uang ganti rugi yang didapat oleh masyarakat disesuaikan dengan luas lahan yang dibebaskan. Ketentuan harga dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan ruas tol Mojokerto – Kertosono di Kecamatan Gedeg ini yaitu sebesar Rp 125.000,- per meter persegi untuk lahan berupa persawahan. Rata-rata uang ganti rugi yang diterima oleh responden yaitu sebesar Rp 296.032.658,00.

Responden memanfaatkan uang ganti rugi tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pada kenyataannya, responden memanfaatkan uang yang didapat tidak hanya untuk memenuhi satu jenis kebutuhan, namun untuk berbagai kebutuhan. Sehingga pemaparan data dalam penggunaan uang ganti rugi dalam penelitian ini hanya pada sebagian besar jumlah uang yang digunakan.

Mayoritas responden menggunakan uang ganti rugi yang didapat untuk dibagi kepada keluarga atau anak-anaknya yaitu sejumlah 39 responden (52%). Hal ini karena banyak sawah milik mereka yang merupakan lahan sawah warisan orang tua sehingga uang ganti rugi yang didapat dibagikan kepada saudara kandung yang ada. Penggunaan uang ganti rugi oleh responden secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penggunaan Uang Ganti Rugi Oleh Responden Di Kecamatan Gedeg

No.	Penggunaan Uang Ganti Rugi	Jumlah	Persentase
1.	Ditabung	13	17 %
2.	Investasi	4	5 %
3.	Kepemilikan Barang/Konsumsi	5	7 %
4.	Modal Usaha	4	5 %
5.	Dibagi kepada keluarga/anak	39	52 %
6.	Haji/Umroh	11	14 %
Jumlah		76	100 %

Sumber : Data Primer (2016)

2. Kelangsungan Mata Pencapaian

Kelangsungan mata pencapaian dalam penelitian ini terfokus pada jenis mata pencapaian responden setelah lahan persawahan miliknya dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan ruas Tol Mojokerto – Kertosono. Sebelum pembebasan lahan

dilakukan, mata pencaharian utama keseluruhan responden yaitu sebagai petani.

Masih banyak responden yang menjadikan petani sebagai mata pencaharian utama setelah pembebasan lahan dilakukan, karena masih memiliki lahan sawah di wilayah lain yaitu sejumlah 42 responden (55%), dan terdapat 34 responden (45%) yang tidak lagi menjadikan petani sebagai mata pencaharian utama. Sejumlah 34 responden (45%) yang tidak lagi ber-mata pencaharian sebagai petani, terdapat 5 responden (6%) responden yang kehilangan keseluruhan lahan sawah miliknya, sehingga responden tersebut harus beralih pada sektor lain. Berikut merupakan tabel mata pencaharian utama responden di Kecamatan Gedeg setelah lahan pertanian dibebaskan:

Tabel 2. Mata Pencaharian Utama Responden di Kecamatan Gedeg Setelah Pembebasan Lahan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	42	55 %
2.	Penjual Sayur/Makanan	20	26 %
3.	Usaha Pracangan*	5	7 %
4.	Penjahit	1	1 %
5.	Ternak	1	1 %
6.	Buruh	5	7 %
7.	Wirausaha	2	3 %
Jumlah		76	100 %

Sumber : Data Primer (2016)

*Pracangan adalah toko kecil yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari

Sektor lain yang menjadi peralihan mata pencaharian setelah pembebasan lahan, sebelumnya merupakan mata pencaharian sampingan responden.

3. Perbedaan Pendapatan

Perbedaan pendapatan dalam penelitian ini akan menunjukkan apakah terdapat perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pembebasan lahan untuk pembangunan ruas Tol Mojokerto – Kertosono dilakukan.

Berikut merupakan tabel pendapatan per bulan masyarakat sebelum pembebasan lahan:

Tabel 1. Pendapatan Rata-Rata Responden Per Bulan Sebelum Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Ruas Tol Mojokerto –Kertosono Di Kecamatan Gedeg

No.	Pendapatan/Rp (dalam ribuan)	Jumlah	Persentase
1.	500 – 1.800	17	23 %
2.	1.850 – 3.150	14	18 %
3.	3.200 – 4.500	28	37 %
4.	4.550 – 5.850	6	8 %
5.	5.900 – 7.200	7	9 %
6.	7.250 – 8.550	4	5 %
Jumlah		76	100 %

Sumber : Data Primer (2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (37%) pendapatan responden sebelum pembebasan lahan terletak pada antara Rp

3.200.000,00 sampai Rp 4.500.000,00 yaitu sejumlah 28 atau 37 % responden. Secara keseluruhan, rata-rata pendapatan sebelum pembebasan lahan sejumlah Rp 3.503.947,00.

Berikut ini adalah pendapatan responden per bulan setelah pembebasan lahan untuk pembangunan ruas Tol Mojokerto – Kertosono:

Tabel 2. Pendapatan Per Bulan Responden Setelah Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Ruas Tol Mojokerto–Kertosono Di Kecamatan Gedeg

No.	Pendapatan/Rp (dalam ribuan)	Jumlah	Persentase
1.	300 – 1.550	22	29 %
2.	1.600 – 2.850	11	14 %
3.	2.900 – 4.150	25	34 %
4.	4.200 – 5.450	11	14 %
5.	5.500 – 6.750	4	5 %
6.	6.800 – 8.050	3	4 %
Jumlah		76	100 %

Sumber : Data Primer (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan responden setelah pembebasan lahan terletak pada antara Rp 2.900.000,00 sampai Rp 4.150.000,00 yaitu sejumlah 25 responden (34%). Secara keseluruhan, rata-rata pendapatan setelah pembebasan lahan dilakukan sejumlah Rp3.000.658,00. Berdasarkan perbandingan dari kedua tabel diatas dapat diketahui adanya penurunan pendapatan responden sebesar Rp 503.289,00 (16,8%) setelah adanya pembebasan lahan untuk pembangunan ruas Tol Mojokerto – Kertosono.

Perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pembebasan lahan di Kecamatan Gedeg juga dianalisis menggunakan Uji t berpasangan (*paired sample t-test*). Data harus dianalisis menggunakan uji normalitas sebelum dilakukannya Uji t berpasangan (*paired sample t-test*), sebagai syarat bahwa data harus berdistribusi normal.

Adapun dalam uji ini terdapat hipotesis yang diajukan adalah:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Dengan asumsi sebagai berikut:

H_0 ditolak jika $p < \alpha = 0,05$

H_0 diterima jika $p > \alpha = 0,05$

Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan program SPSS 22 :

Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum	,107	76	,062	,951	76	,076
Sesudah	,097	76	,071	,960	76	,088

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan *Output Test of Normality* diperoleh nilai signifikan untuk pendapatan sebelum sebesar 0,076, sedangkan nilai signifikan untuk pendapatan sesudah sebesar 0,088. Karena nilai

signifikan pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah lebih besar $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data pendapatan responden berdistribusi normal atau H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Pendapatan responden sebelum dan sesudah pembebasan lahan juga diuji menggunakan *paired sample t-test* dengan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_0 :Tidak ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah lahan pertanian dibebaskan

H_1 :Ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah lahan pertanian dibebaskan.

Dengan asumsi H_0 ditolak jika $p < \alpha$

p : Hasil perhitungan signifikansi

α : 5 % (0,05)

Berikut hasil analisis *paired sample t-test* dari data pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah lahan pertanian masyarakat dibebaskan dengan menggunakan SPSS 22 :

Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji-t Berpasangan

Paired Samples Test									
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pa ir 1	Sebelum - Sesudah	544038,158	645938,679	74094,248	39643,4847	69164,1469	7,343	,000	

Dari analisis di atas dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Tingkat kepercayaan 95 % dan nilai signifikansi (p) $< 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Terdapat perbedaan antara pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah lahan pertanian dibebaskan di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembangunan bidang transportasi yang kini sedang dalam upaya penyelesaian sedang berlangsung di berbagai wilayah di Pulau Jawa, khususnya pada ruas Tol Mojokerto-Kertosono yang merupakan bagian dari tol Trans Jawa. Pentingnya akses transportasi dari satu wilayah ke wilayah lain memungkinkan untuk semakin dikembangkannya bidang transportasi oleh pemerintah.

Pembangunan prasarana merupakan pembangunan dasar atau prasarana politik, ekonomi dan sosial untuk mendorong masyarakat berusaha mencapai modernisasi, yang meliputi perubahan institusional untuk mendukung usaha nasional dalam mengembangkan kemudahan seperti jalan/ dan pengaman, komunikasi, pengairan/ dan sistem perhubungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 : 77).

Kemudahan transportasi akan mampu mendukung perkembangan pada berbagai sektor dan mempermudah akses masyarakat dalam mencapai wilayah lain. Pemerintah pun melakukan perubahan alif fungsi lahan untuk membangun akses tol di berbagai wilayah.

Iqbal dan Sumaryanto (2007 : 20) menyatakan bahwa alih fungsi lahan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kepadatan penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan lahan

semakin tinggi, daerah persawahan yang letaknya banyak di daerah perkotaan, adanya pembangunan prasarana dan sarana seperti permukiman, industri dan lainnya cenderung lebih cepat terutama di wilayah dataran. Alih fungsi lahan yang dilakukan mengahruskan pemerintah melakukan pembebasan lahan milik masyarakat yang dilalui oleh proyek perencanaan pembangunan.

Pembebasan Tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti-rugi. Jelasnya suatu pembebasan tanah (sinonim dengan pelepasan hak atas tanah) ialah setiap perbuatan yang dimaksud langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa atas tanah tersebut (Departemen Pekerjaan Umum Sekretariat Jenderal-Biro Hukum, 1983 : 7).

Responden memanfaatkan uang ganti rugi yang didapat untuk memenuhi berbagai kebutuhan ataupun untuk ditabung, modal usaha dan investasi. Namun, mayoritas responden menggunakan uang ganti rugi yang didapat untuk dibagi kepada keluarga atau anak-anaknya yaitu sejumlah 39 responden (52%), hal ini karena banyak sawah milik mereka yang merupakan lahan sawah warisan orang tua sehingga uang ganti rugi yang didapat dibagikan kepada saudara kandung yang ada.

Responden menyatakan tidak setuju dengan harga ganti-rugi yang diberikan oleh pemerintah karena berada dibawah pasaran harga sawah di Kecamatan Gedeg. Selain itu, pernyataan tidak setuju dari masyarakat juga muncul karena adanya polusi udara dan polusi suara yang timbul sejak proyek pembangunan dilaksanakan, hal ini karena banyak truk material dan kendaraan pengangkut alat berat yang melalui jalan desa, yang juga mengakibatkan rusaknya jalan desa di beberapa bagian.

Proyek pembangunan ini juga meresahkan masyarakat yang masih memiliki sawah di dekat pembangunan ruas tol karena pihak proyek tidak mengindahkan kesepakatan bersama masyarakat bahwa pembangunan ruas tol tidak akan mengganggu jalur pengairan sawah, sehingga masyarakat menganggap bahwa analisis dampak lingkungan dari pembangunan ini masih kurang sesuai.

Masyarakat juga merasakan dampak sosial-ekonomi dari pembangunan ini. Soeriaatmadja (2000 : 83) mengatakan bahwa banyak kegiatan manusia termasuk proyek pembangunan menimbulkan dampak yang nyata pada faktor sosio-ekonomi baik dalam daerah dimana proyek pembangunan itu berjalan atau akan dilaksanakan maupun disekitarnya. Dampak itu tentunya bisa menguntungkan bisa juga merugikan.

Dampak sosial-ekonomi ini menyangkut mata pencaharian dan pendapatan masyarakat. Mata pencaharian responden sebagai petani mengalami perubahan karena lahan pertanian yang terkena pembebasan dan sulitnya untuk mencari lahan pertanian di wilayah lain. Adapun responden yang masih menjadikan petani sebagai mata pencaharian utama karena masih memiliki lahan sawah di wilayah yang tidak terkena pembebasan lahan.

Responden harus beralih pada mata pencaharian lain. Bidang wiraswasta menjadi pilihan sebagian besar masyarakat, yaitu sebagai penjual sayur dan makanan. Bidang ini dipilih karena sebelumnya merupakan mata pencaharian sampingan dan dianggap paling mudah untuk dikembangkan, dengan memanfaatkan keterampilan yang telah dimiliki untuk mengolah dan memasak beberapa jenis makanan.

Hal ini juga mempengaruhi pendapatan responden. Disamping berkurangnya pendapatan karena hilangnya lahan sawah setelah pembebasan, persaingan sesama penjual pun mempengaruhi pendapatan, karena semakin banyaknya penjual sayur dan makanan yang tersebar di wilayah desa.

Mata pencaharian yang sebelumnya menjadi sampingan pada kenyataannya kini menjadi mata pencaharian utama responden dan mampu memberikan pendapatan baru diluar sektor pertanian.

Keseluruhan responden mengalami penurunan pendapatan, yaitu sebesar Rp 503.289,00 (16,8%). Rata-rata pendapatan responden sebelum pembebasan lahan sebesar Rp 3.503.947,00, setelah pembebasan lahan rata-rata pendapatan menjadi Rp 3.000.658,00.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Uang ganti rugi yang didapat responden sebagian besar terletak pada kisaran Rp 100.000.000,00 – Rp 300.000.000,00 yaitu sejumlah 43 responden (57%). Penggunaan uang ganti rugi oleh responden sebagian besar dibagikan kepada saudara atau anak-anaknya, yaitu sejumlah 39 responden (52%). Hal ini karena sebagian besar lahan sawah yang dibebaskan merupakan sawah warisan dari orang tua dan saudara lainnya merasa masih memiliki hak untuk mendapatkan bagian.
2. Adanya pembangunan ruas Tol Mojokerto – Kertosono di Kecamatan Gedeg yang dibarengi dengan pembebasan lahan sawah milik masyarakat memberikan pengaruh terhadap mata pencaharian 34 responden (45%). Dari 76 responden, terdapat 42 responden (55%) yang tetap menjadi petani dan menggarap lahan sawah milik sendiri. Hal ini karena banyak petani yang masih memiliki lahan sawah di wilayah lain yang tidak terkena pembebasan untuk pembangunan ruas tol, sehingga masih ada sawah yang dapat mereka garap dan tidak merubah mata pencaharian mereka sebagai petani.
3. Pendapatan rata-rata setiap bulan responden yang lahan pertaniannya terkena pembebasan lahan mengalami penurunan yang signifikan. Secara keseluruhan, pendapatan rata-rata responden mengalami penurunan sebesar Rp 503.289,00 (16,8%) setelah pembebasan lahan dilakukan. Sebelum pembebasan lahan dilakukan, pendapatan rata-rata setiap bulan masyarakat sebesar Rp 3.503.947,00, setelah pembebasan lahan dilakukan pendapatan rata-rata setiap bulan menjadi Rp 3.000.658,00.

Saran

1. Pemerintah

Pemerintah harus lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang lahannya terkena pembebasan untuk pembangunan ruas Tol Mojokerto – Kertosono.

Pemerintah perlu memberikan penyuluhan keterampilan kepada masyarakat yang lahannya terkena pembebasan, agar masyarakat mampu mengembangkan potensi di bidang lain, selain pengolahan lahan pertanian.

2. Masyarakat

Masyarakat harus mampu menggunakan uang ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, seperti penggunaan uang untuk investasi, sehingga penggunaan uang yang didapat tidak sia-sia dan habis hanya pada berbagai kebutuhan yang sifatnya konsumsi dan tidak untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R, Adisamita S A. 2011. *Manajemen Transportasi Darat: Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar (Jakarta)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soeriaatmadja, R E. 2000. *Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan Nasional
- Iqbal, M dan Sumaryanto. 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. (Laporan Penelitian) Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- , 1983. *Buku Pedoman: Tata Cara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah*. Departemen Pekerjaan Umum: Sekretariat Jenderal – Biro Hukum
- , 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- <http://jurnalibukota.com/2014/1346-menteri-pu-resmikan-ruas-tol-mojokerto-kertosono-seksi-1.html>, diakses 23 Oktober 2015